

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Menurut Supriyono (2018) teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori agensi menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak principal dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agent, di mana pihak principal mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agent (Jensen and Meckling 1976). Pagalung (2008) memaparkan bahwa hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah *agent* dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk di parlemen) adalah *principal*. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Ernati 2009). Pertama adalah masalah keagenan yang muncul pada saat keinginan – keinginan atau tujuan – tujuan principal dan agen saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi apakah agent telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua, masalah pambagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan antara kepemilikan (pihak principal) yaitu pemegang saham dengan pihak pengendalian (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola sebuah instansi.

Implikasi dari teori agensi terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan dimana Pemerintah Daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat yang memenuhi syarat keterandalan yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

2.2 Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Keterandalan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

1. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diversifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, informasi diserahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010).

2.2.2 Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk nyata terstrukturnya posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2006).

Adapun unsur-unsur laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional yang terdiri dari pendapatan Laporan Operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

4. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan kas yaitu semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah dan pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari bendahara negara/daerah.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan keuangan pemerintah yang berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, selain bentuk pertanggungjawaban pemerintah, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai kelompok pemakai dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan tersebut. Adapun kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dalam Abdul Halim, dkk (2012:8) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah

pemerintah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

2.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Menurut Griffin (2004) dalam Delanno (2013) sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi (2005) dalam Indriasari dan Nahartyo, (2008). Menurut Riandi (2012) keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia sangat penting karena ketiga hal ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Kualitas dari laporan keuangan yang disusun, dikelola dan dilaporkan sangat bergantung kepada tiga hal ini. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Zuliarti, 2012).

Menurut Riyadi Soeprpto (2010) dalam (Rachman 2016) upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan yaitu:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.
2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi.
3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Sedangkan pengertian kapasitas secara terminology menurut Wikipedia Kapasitas berasal dari bahasa Belanda yang asal muasal katanya dari kata "*capaciteit*" yang dapat berarti:

1. Daya tampung, daya serap
2. Ruang atau fasilitas yang tersedia

3. Kemampuan (maksimal)

Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen utama yang penting. Karena sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi informasi yang disajikan itu sangat bergantung kepada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai.

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi teknologi informasi menurut Darwanis & Mahyani (2009) dalam penelitiannya adalah teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.

Thompson et al. (1991) dalam Tjhai dalam I. P. Hendra Wijaya (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi

informasi, diantaranya yaitu:

1. Faktor Sosial

Merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi sosial tertentu.

2. Perasaan Individu

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu atas pekerjaan yang dilakukannya, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan dan penyelesaian tugas pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi.

3. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan.

4. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik individu pemakai, teknologi yang digunakan, dan tugasnya yang berbasis teknologi.

5. Konsekuensi Jangka Panjang

Konsekuensi jangka panjang dilihat dari output yang dihasilkan apakah pengguna dapat merasakan keuntungan di masa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau meningkat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

6. Kondisi yang Memfasilitasi

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objek di luar lingkungan yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 65

tahun 2010 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam instansi pemerintah dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait.

2.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) dalam Primayana, Atmadja dan Darmawan (2014), pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja, untuk memebandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan untuk memperbaiki serta sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan juga digunakan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- a) Pengaturan dan penetapan
- b) Perencanaan dan penganggaran
- c) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- d) Pertanggungjawaban keuangan daerah

e) Pendapatan dan belanja daerah.

Praktek pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara internal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan keuangan daerah oleh BPK dilakukan melalui pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E UUD 1945.

Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan laporan keuangan (Tuasikal, 2007).

2.6 Pengendalian Intern

Krismiaji (2005) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Menurut Wardani (2017) pengendalian intern merupakan cara untuk mengawasi, mengarahkan dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi. Pengendalian intern juga berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) sehingga laporan keuangan memberikan keyakinan keandalan. Menurut Pemandagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari

keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan(Pemendagri No.21 Tahun 2011).

Definisi pengendalian intern menurut IAPI (2011), dalam Sukrisno Agoes (2012:100) adalah Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

b. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian

internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilan tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Zuliarti	2012	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kudus)	Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi pengendalian interna akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terandalan pelaporan.
2	Safiyulloh	2017	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas

			(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3	Reni Rombong	2017	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4	Warih Komarasari	2017	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bantul)	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5	Dwi Jayanti	2018	<p>Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Penegendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Pesawaran)</p>	<p>Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah melalui pengendalian intern sebagai variabel intervening. Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern sebagai variabel intervening.</p>
6.	Setiawati dan Pradana	2018	<p>Pengaruh Kualitas Sumber Daya</p>	<p>Kualita Sumber Daya Manusia dan</p>

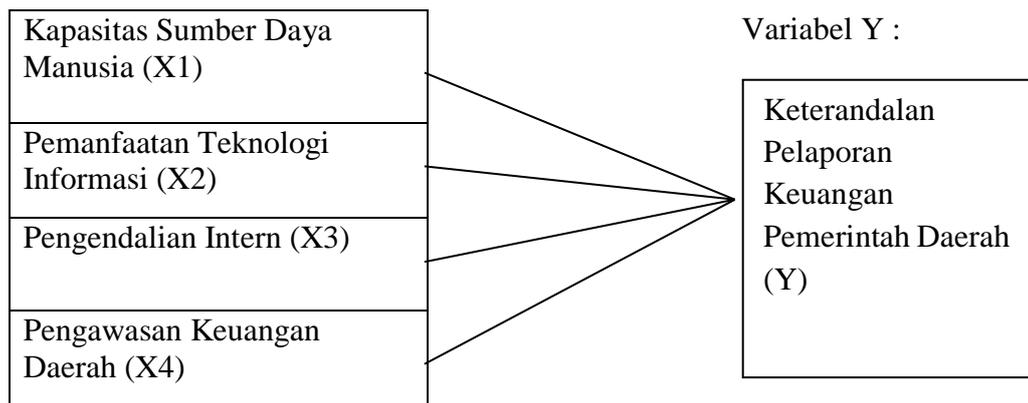
			Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kabupaten Boyolali)	Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7	Gusti Ayu Putu Messa Larasati	2019	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Metro)	Kompetensi sumber daya manusia dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan. Pemanfaatan teknologi informasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan.

8	Hafy Bagaswara	2019	<p>Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada pemerintahan Kabupaten Boyolali)</p>	<p>Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan daerah.</p>
---	----------------	------	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel X :



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Jumlah sumber daya manusia yang tepat dan dengan kompetensi yang baik akan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia saling berhubungan. Penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pelaksanaan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Bagaswara (2019) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan Pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.9.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Cara pengukurannya berdasarkan pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat didukung oleh keahlian personil mengoperasikannya dapat meningkatkan keandalan pada pelaporan keuangan daerah. Proses kerja pemerintah secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan tercatat lebih sistematis maka akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang andal menurut Kombong (2017).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya (Hawing, 2017). Penelitian Komarasari (2017) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.9.3 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan wajar terhadap efektivitas dan efisiensi perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dilakukan secara terus menerus. Di samping itu, diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagaswara (2019) membuktikan bahwa pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.9.4 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern menurut Pemdagri Nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman atas laporan keuangan daerah pasal 1 (10) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan untuk pencapaian yang efektif dan efisien, serta memadai perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2017) membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Pesawaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah